

MASYARAKAT GAMPOENG SIKUNDO DAN PEMBERDAYAAN KOMUNITAS ADAT TERPENCIL

T. Murdani

Dosen pada Jurusan Pengembangan Masyarakat Islam
Fakultas Dakwah dan Komunikasi, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry
Darussalam, Banda Aceh
E-mail: teuku.murdani@gmail.com

Ratna Utami Lilia Dewi

Penyuluh Ahli Madya, Kementerian Sosial
Email: liacbt@gmail.com

Abstract

Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil (PKAT) is a program as to develop isolated Customary community skills and knowledge so that they are able to fulfil their basic needs. The aim of the program is to improve isolated community social welfare and income generation This article is discussing a community's social condition, opportunity, the availability of human resources as well as natural recourses to support the program. All of these analyses as a preparation phase for community social empowerment purposes. Overall, the research is aiming to; 1). the socio-economic conditions, natural resources, socio-cultural and social welfare of the community.2). to understand the aspirations of the community in affording their own welfare.3). to understand the real situation so that the program is able to design the strategy of the empowerment based on current conditions. The observation and interview conducted in gampoeng Sikundo, kecamatan Pantai Cermen, kabupaten Aceh Barat. The study summarized that; all local community members are farmers. the Sikundo community lived in an unsettled condition in terms of houses, public services and welfare are ready to make changes to have a better life. The psychological and social conditions of residents who help each other are very valuable capital in empowerment. The West Aceh district government has expressed their full support for the implementation of the empowerment program and is ready to provide the necessary support. The bridge foundation has been built, so it is very crucial to continue the process of the bridge construction. Improving road conditions will also greatly contribute to the success of the program.

Keywords: *Isolated Community, empowerment, social and economic*

A. Pendahuluan

Pemberdayaan sosial merupakan elemen yang sangat penting dalam proses pembangunan. Dawson (1998) mengemukakan bahwa pemberdayaan adalah solusi untuk pengentasan kemiskinan di negara berkembang, upaya pemberdayaan meningkatkan kemandirian orang miskin.

Pemberdayaan sosial masyarakat adalah kegiatan untuk mengedukasi masyarakat agar lebih mandiri dan inovatif untuk dapat mengembangkan diri. Douglas dan Marc yang dikutip dari Rappaport (1995) menjelaskan bahwa pemberdayaan adalah suatu konstruksi yang

menghubungkan kekuatan dan kompetensi individu, sistem bantuan alam, dan perilaku proaktif dengan kebijakan sosial dan perubahan sosial. Memberdayakan suatu komunitas adalah proses memberikan kekuatan atau mentransfer kekuatan kepada individu atau sekelompok orang sehingga mereka dapat mengendalikan dan mengelola kehidupan mereka sendiri. Berger dan Neuhaus (1977) menyebutkan bahwa pemberdayaan pada tingkat individu adalah proses di mana individu mendapatkan kekuatan dan kontrol atas kehidupan mereka dan pemahaman kritis terhadap lingkungan mereka. Alkadaf (2021) mengutip dari Birdsall, (2014) menggambarkan bahwa;

“pembangunan ekonomi dan pembangunan sosial sebagai dua hal yang terpadu. Pembangunan sosial adalah pembangunan ekonomi untuk merubah keadaan ekonomi yang lebih dari suatu masyarakat. Tujuan mendasar dari pembangunan ekonomi bukanlah pertumbuhan ekonomi, melainkan kemajuan kesejahteraan manusia, yaitu apa yang sering disebut pembangunan manusia atau pembangunan sosial. Jadi, tujuan pembangunan sesungguhnya hanya satu yaitu kesejahteraan manusia dan pembangunan sosial adalah pembangunan manusia itu sendiri (hal. 42).”

Ada sudut pandang yang berbeda antara aktivis sosial dan perusahaan bisnis dalam mengartikan pemberdayaan. Aktivis sosial mendefinisikan pemberdayaan sebagai peningkatan pendapatan keluarga miskin, sementara perusahaan bisnis mengembangkan kemampuan karyawan untuk lebih produktif dalam tugas mereka. Jane et al (2002) menjelaskan bahwa aktivis sosial lebih fokus pada masalah kemiskinan di masyarakat dan mereka melihat pemberdayaan sebagai upaya lokal, akar rumput yang dirancang untuk menginspirasi orang miskin untuk menantang status quo mereka menjadi lebih baik. Di sisi lain, manajer bisnis dan personalia umumnya berpikir tentang pemberdayaan sebagai cara untuk meningkatkan produktivitas dalam struktur yang sudah mapan.

Kementerian Sosial mendefinisikan pemberdayaan sosial sebagai kegiatan untuk mengembangkan keterampilan dan otonomi masyarakat sehingga mereka dapat memenuhi kebutuhan dasar mereka (Kemensos, 2019). Diskusi dalam penelitian ini berfokus pada pemberdayaan sosial masyarakat adat terpencil di desa Sikundo Kabupaten Aceh Barat, Aceh. Program ini dilaksanakan oleh Kementerian Sosial Indonesia melalui Dinas Sosial provinsi Aceh. Sebagaimana diuraikan dalam petunjuk teknis, program ini bertujuan untuk memutus rantai kemiskinan dan membuka keterisolan kelompok masyarakat pedalaman agar mereka dapat berinteraksi dengan kelompok masyarakat lainnya. Sebagian besar kegiatan pemberdayaan sosial khususnya di provinsi Aceh adalah pelatihan dalam bidang pertanian sehingga masyarakat memiliki pengetahuan dan keterampilan metode pertanian yang tepat, mengadopsi teknologi pertanian dan membuka saluran pemasaran yang lebih baik untuk

memasarkan produksinya. Bangunan rumah adalah bagian dari memutus rantai kemiskinan dan membangun jalan adalah untuk memutus status isolasi (Petunjuk Teknis, 2016).

Walaupun tujuan pembangunan telah dirumuskan secara menyeluruh didalam dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) ayat empat: tujuan dasar negara adalah untuk membentuk Pemerintah Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tanah air, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan berkontribusi terhadap terwujudnya ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian dan keadilan sosial (Republik Indonesia, 1945).

Kemudian dikuatkan oleh pendapat Solikatun & Masrurroh (2018) yang berpendapat bahwa:

“Pembangunan nasional Indonesia bertujuan untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur, material, dan spiritual berdasarkan Pancasila, dalam negara kesatuan Republik Indonesia yang merdeka, berdaulat, dan bersatu, dalam suasana kehidupan bangsa yang damai, tertib, dan dinamis, serta di dalam lingkungan yang mandiri, ramah, tertib dan damai (hal. 71).”

Untuk mewujudkan cita-cita sebagaimana diamanatkan didalam UUD 45, Pemerintah Indonesia secara terus menerus melakukan upaya-upaya pembangunan dalam berbagai bidang dengan tujuan untuk mensejahterakan rakyatnya. Isbandi (2008) menegaskan bahwa berbagai upaya dan variasi pemerintah dalam mempercepat pembangunan pada dasarnya dilakukan guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Namun luas dan banyaknya pulau-pulau di Indonesia tentu saja akan berdampak pada sulitnya mewujudkan upaya-upaya mensejahterakan rakyat secara menyeluruh. Oleh karenanya dibutuhkan upaya yang terintegrasi dan berkelanjutan serta dengan berbagai inovasi dan variasi agar tercapai kesejahteraan yang didambakan oleh setiap anggota masyarakat Indonesia. Salah satu program yang dilakukan adalah melalui Kementrian Sosial adalah program terhadap kelompok masyarakat yang berdomisili di kawasan pedalaman yang sangat sedikit memiliki akses keluar komunitas mereka. Program ini dibingkai dalam Program Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil (PKAT). Program yang dilaksanakan melalui Dinas Sosial di tingkat provinsi dan kabupaten ini berbentuk pemberdayaan sosial agar masyarakat yang menjadi target berdaya dan mampu mewujudkan kesejahterannya dan keluarganya.

Upaya ini memiliki dasar dan latar hukum yang kuat karena pemerintah Indonesia secara tegas menerbitkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial, dimana pada ketentuan umum pasal 1, ayat 1 disebutkan ‘Kesejahteraan Sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya.’

Untuk menindak lanjuti amanat undang-undang tersebut maka kementerian sosial merupakan institusi yang paling bertanggung jawab terhadap upaya-upaya kesejahteraan setiap warga Negara. Oleh karena itu maka perlu dilakukan langkah-langkah strategis dalam upaya memberdayakan masyarakat agar maju dan mandiri.

Salah satu upaya pemerintah untuk menjangkau dan mewujudkan pembanguana ke berbagai pelosok tanah air adalah melalui program Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil (PKAT) yang di laksanakan oleh Kementerian Sosial melalui kelompok kerja di Dinas Sosial di setiap provinsi di Indonesia.

Dalam melaksanakan program dimaksud sangat diperlukan data dan kondisi lokasi yang akurat sehingga program yang rencanakan akan tertuju kepada kelompok yang tepat sasaran. Untuk itu Program Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil memulai program pemberdayaannya dengan melakukan penelitian calon lokasi agar program yang direncanakan benar-benar mampu memberi dampak yang positif terhadap komunitas yang mendapatkan bantuan tersebut.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dalam pengmpulan data lapangan. Sifat metodologi penelitian kualitatif menurut Catherine (2007) adalah “mengeksplorasi sikap, perilaku dan pengalaman melalui metode seperti wawancara atau Diskusi kelompok terfokus. Hal ini bertujuan untuk mendapatkan pendapat mendalam dari peserta (hal, 15-16).” Denzin dan Lincoln (1994) menyatakan bahwa:

“penelitian kualitatif adalah metode multi fokus, yang melibatkan pendekatan interpretatif, naturalistik untuk materi pelajarannya; ini berarti bahwa peneliti kualitatif mempelajari sesuatu dalam setting alamiahnya, mencoba untuk memahami atau menginterpretasikan fenomena dari segi makna yang dibawa orang kepada mereka (hal. 2).”

maka penelitian ini mengusulkan metode penelitian kualitatif yang mengakomodasi maksud dan tujuan dari penelitian ini.

Dalam mengumpulkan data penelitian ini menggunakan metode observasi dan wawancara semi-terstruktur. Peneliti melakukan pengamatan langsung dengan cara berbaur dengan masyarakat untuk mengamati kondisi sosial masyarakat yang menjadi target. Kemudian berdasarkan pengamatan peneliti menggunakan sejumlah daftar pertanyaan yang sudah disiapkan untuk ditanyakan, namun dalam mengumpulkan data tidak terbatas kepada pertanyaan yang telah disusun. Akan tetapi peneliti akan memberikan pertanyaan sesuai dengan jawaban responden untuk mendalami masaalah yang ada. Menurut Stake (2010) tujuan wawancara adalah untuk memperoleh informasi unik dari orang yang diwawancarai dan menemukan informasi yang

tidak dapat diamati oleh peneliti. Sedangkan wawancara semi-terstruktur sebagaimana di bahas oleh Dawson (2000) adalah;

“wawancara semi-terstruktur adalah jenis wawancara penelitian sosial kualitatif yang paling umum. Peneliti mencari informasi spesifik yang dapat dibandingkan dan dikontraskan dengan informasi yang diperoleh dalam wawancara lain. Untuk melakukan ini, pertanyaan yang sama perlu ditanyakan dalam setiap wawancara. Namun, peneliti juga ingin agar wawancara tetap fleksibel sehingga informasi penting lainnya tetap bisa muncul (hal.27 – 28).”

Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas, maka penelitian ini memiliki tiga masalah yang ingin teliti: a). Bagaimana kondisi sosial ekonomi, sumber daya alam, sosial budaya dan kesejahteraan sosial masyarakat Desa Sikundo, Kec. Pante Ceureumen, Aceh Barat. B). Apa aspirasi masyarakat dalam rangka mengupayakan kesejahteraan bagi mereka sendiri. C). Bagaimana bentuk dan strategi rencana pemberdayaan yang sesuai dengan kondisi mereka saat ini.

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka penelitian ini memiliki tiga tujuan yang ingin di capai: a). Memahami kondisi sosial ekonomi, sumber daya alam, sosial budaya dan kesejahteraan sosial masyarakat Pantan Sinaku. b). Mengetahui keinginan dan kebutuhan masyarakat Pantan Sinaku dalam upaya pemberdayaan kesejahteraan sosial. c).Menyusun strategi dan model pemberdayaan yang sesuai serta tepat sasaran.

Lokasi Penelitian:

penelitian ini berlokasi di gampong (Desa) Sikundo, Kecamatan Pantai Cermen, Kabupaten Aceh Barat, Provinsi Aceh. Pemilihan lokasi ini berdasarkan grand data lokasi Program Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil yang telah disiapkan oleh Kementrian Sosial untuk Provonsi Aceh. Dalam melakukan kunjungan lapangan peneliti didampingi oleh staf Dinas Sosial untuk memfasilitasi pengumpulan data lapangan.

Populasi adalah jumlah keseluruhan objek yang akan diteliti. Dalam penelitian ini yang menjadi populasi adalah seluruh warga gampong Sikundo Sampel adalah bagian dari populasi yang diangkat dapat mewakili populasi. Koentjaraningrat (1987) mengatakan, bahwa sampel adalah bagian terkecil dari populasi yang merupakan objek sesungguhnya dari suatu penelitian, sampel yang dipilih adalah yang dapat mewakili populasi. Dengan alasan mempermudah dan fokus maka penelitian ini tidak menggunakan sampling satu gampong Sikundo, akan tetapi hanya menfokus pada calon penerima bantuan saja. Senada dengan pernyataan Laws, dkk, (2013), untuk menhemat waktu perlu menfokus kepada sampling yang berhubungan dengan tujuan penelitian, karena tidak mungkin menginterview semua orang untuk mencari jawaban terhadap penelitian kita. Berdasarkan pertimbangan diatas maka sampling dalam penelitian ini adalah beberapa perwakilan masyarakat gampong Sikundo, Geuchik, tuha peut, tokoh masyarakat dan pemuka agama masyarakat di dusun Alue Kenyaran yang memenuhi kriteria sebagai penerima program Pemberdayaa Komunitas Adat Terpencil dan seluruh perangkat

desa dan adat setempat. Untuk melengkapi data yang diperlukan peneliti juga mewawancarai Camat Kecamatan Pante Ceureumen, Kabupaten Aceh Barat.

C. Pemberdayaan Sosial Komunitas Adat Terpencil

Komunitas Adat Terpencil merupakan masyarakat yang hidup di lokasi yang sangat jauh dari teknologi dan fasilitas-fasilitas layanan umum negara. Kementerian Sosial menetapkan kriteria bagi Komunitas Adat Terpencil sesuai dengan Peraturan Presiden No. 186 Tahun 2014 Bab II Pasal 4 ayat 2 kriteria KAT adalah:

- a. Keterbatasan akses pelayanan sosial dasar;
- b. tertutup, homogen, dan penghidupan tergantung kepada sumber daya alam;
- c. marjinal di pedesaan dan perkotaan; dan / atau,
- d. tinggal di wilayah perbatasan antar negara, daerah pesisir, pulau-pulau terluar, dan terpencil.

Peraturan presiden tersebut kemudian dijabarkan lebih lanjut melalui Peraturan Menteri Sosial Nomor 12 Tahun 2015 Tentang Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 186 Tahun 2014 Tentang Pemberdayaan Sosial Terhadap Komunitas Adat Terpencil yang membagi kriteria tersebut menjadi tiga kategori yakni kategori 1 (berpindah), kategori 2 (menetap sementara) dan kategori 3 (menetap).

Kementerian Sosial Republik Indonesia telah merumuskan definisi dari PKAT yakni sekumpulan orang dalam jumlah tertentu yang terikat dalam kesatuan geografis, ekonomi, dan/atau sosial budaya, dan miskin, terpencil, dan/atau rentan sosial ekonomi (Depsos RI, 2016). Berdasarkan pengertian diatas maka dapat dipahami bahwa PKAT adalah sebuah kegiatan yang dilakukan terhadap sekumpulan orang yang menetap di daerah terpencil dalam kondisi tidak berkecukupan baik sandang maupun pangan, rentan terhadap sosial ekonomi serta terisolir dari dunia luar. Disamping secara budaya mereka kurang bersentuhan dengan kelompok luar dan belum tersentuh teknologi modern sebagaimana masyarakat Indonesia pada umumnya.

Beberapa kalangan di Indonesia berargumentasi bahwa Komunitas Adat Terpencil merupakan komunitas atau suku asli Indonesia. Salah satunya adalah Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) yang mengklaim bahwa Indonesia memiliki sekitar 50 hingga 70 masyarakat suku asli. Sementara Pemerintah Indonesia berpendapat bahwa istilah suku asli tidak relevan untuk konteks Indonesia karena setelah Indonesia merdeka pada tahun 1945 semua suku di Indonesia merupakan suku asli Indonesia (Persoon, 1998). Namun tidak bisa diungkiri bahwa masih banyak Komunitas Adat Terpencil yang belum tersentuh oleh program pembangunan pemerintah dan mereka masih hidup secara alamiah yang mengandalkan alam sebagai sumber kehidupan secara tradisional.

1. Komunitas Adat Terpencil di Aceh Barat, Aceh

Gampoeng Sikundo, Kecamatan Pante Ceureumen, Kabupaten Aceh Barat merupakan salah satu lokasi yang termasuk kedalam grand data lokasi pemberdayaan Kementerian Sosial Republik Indonesia. Pemilihan lokasi ini juga tidak terlepas dari alasan utama yakni sesuai dengan kriteria lokasi PKAT yang telah ditetapkan dalam petunjuk teknis.

Gampoeng Sikundo merupakan salah satu gampong paling ujung dalam Kecamatan Pante Ceureumen. Gampong ini berjarak 15 km dari pusat kecamatan dan 50 km dari ibu kota kabupaten serta 350 km dari ibukota provinsi.

Kondisi alam khususnya tanah yang sepiintas kelihatan sangat subur tidak diimbangi dengan kemampuan bertani yang memadai mengakibatkan kondisi ekonomi mereka tidak berkembang. Banyak kebun yang ditelantarkan karena tidak memiliki kemampuan bertani khususnya dalam menanggulangi hama.

Luas wilayah Gampoeng Sikundo \pm 144 KM² dan tidak ada dusun dalam administratif Gampoeng Sikundo. Perumahan penduduk menyebar dalam luas kawasan ini. Suhu udara rata-rata 30°C, umumnya sore hari sekitar jam 15.00 turun hujan. Rotasi musim umumnya kemarau dimulai bulan Juni s/d bulan Desember sedangkan musim hujan dimulai bulan Januari s/d Mei. Dari letak geografisnya Gampoeng Sikundo memiliki potensi yang sangat bagus untuk berbagai pertanian karena selain dikelilingi oleh gunung, Sikundo memiliki sumber air (sungai) yang sangat melimpah. Air sungai ini bila di buat terusan akan menjadi sumber air sawah yang dapat digunakan untuk menanam padi sepanjang tahun. Memiliki areal persawahan dan kebun pertanian yang sangat luas. Bila memiliki sedikit tehnologi sangat memungkinkan untuk dikembangkan perikanan air payau yang saat ini sudah diinisiasi secara sederhana. Kondisi lingkungan asih sangat alamiah dan memiliki sumber daya alam yang sangat bagus untuk dikelola.

2. Kependudukan

Jumlah total penduduk Gampoeng Sikundo 139 jiwa. Dengan rincian dari jumlah tersebut 67 orang laki-laki, 72 orang perempuan, 4 lansia, 10 balita, 44 anak-anak 21 pemuda dan selebihnya merupakan orang dewasa. Tidak ada warga Sikundo yang memiliki berkebutuhan khusus. Warga gampoeng Sikundo umumnya memiliki tiga profesi utama petani kebun, pencari ikan dan pencari rotan.

Mereka melakukan kegiatan pertanian dengan peralatan yang sangat sederhana, yakni menggunakan parang untuk membersihkan rumput dan cangkul untuk mengolah lahan. Kegiatan pertanian pada umumnya adalah kebun dengan tanaman pinang, sawah, dan sayur-sayuran serta kacang-kacangan. Peralatan untuk mencari ikan sedikit lebih baik yakni sudah mengenal jaring yang umumnya di pasang pada sore hari dan diangkat pada pagi hari. Mencari rotan merupakan kegiatan umum bagi laki-laki ketika tidak bercocok tanam atau setelah panen. Akses kelokasi Gampoeng Sikundo hanya melalui jalur darat. Masyarakat umumnya menggunakan alat transportasi sepeda motor, kendaraan tersebut umumnya tidak memiliki surat menyurat dan kondisi kendaraan tidak normal. Sarana jalan dari kabupaten ke pusat kecamatan telah diaspal namun dari kecamatan ke gamponeg Sikundo masih tanah liat dan sebahagian telah dilakukan pengerasan. Umumnya jalan sangat susah dilalui ketika musim

hujan sedangkan jembatan untuk mencapai gampoeng Sikundo hanya dua kable yang dipakai untuk penyeberangan. Untuk membawa bahan dan peralatan kebutuhan dasar masyarakat menggunakan perahu kecil yang ditarik melalui kabel. Bagi masyarakat Sikundo tidak dikenakan biaya penyeberangan karena dana untuk pengadaan perahu berasal dari dana desa. Namun bila ada masyarakat desa lain yang menggunakannya akan dikenakan biaya Rp. 10.000,- untuk satu arah. Masyarakat bila ingin berpergian ke pusat kecamatan harus mengeluarkan biaya sejumlah Rp.20.000 untuk jasa ojek. Namun bila ingin ke ibu kota kabupaten biayanya menjadi Rp.50.000,-.

Sosial budaya: Menurut penuturan warga, masyarakat gampoeng Sikundo merupakan bekas warga nomaden dimana nenek moyang mereka dulunya memiliki pola kehidupan berpindah-pindah. Mereka terdiri dari petani tadah hujan, pecari ikan di sungai-sungai, dan pencari rotan. Kemudian mereka menemukan lokasi Sikundo yang dianggap sangat cocok untuk menetap karena kondisi tanah yang landai dan dialiri oleh air sungai. Semua anggota masyarakat merupakan satu etnis yakni Aceh. Mereka mulai menetap di lokasi ini sudah semenjak zaman awal-awal kemerdekaan. Awalnya mereka menanam padi sebagai kebutuhan sehari-hari, sayur dan menangkap ikan, namun kemudian mereka berimprufisasi sesuai dengan kebutuhan alam. Mereka kemudian secara tradisional mencoba berbagai tanaman lainnya termasuk kopi dan salak. Namun mereka melakukannya dengan pengetahuan apa adanya, karena mereka tidak belajar disekolah maupun ditempat lain.

Warga masyarakat Sikundo yang umumnya etnis Aceh dalam kesehariannya menggunakan Bahasa Aceh dengan logat Aceh Barat. Sebahagian dari mereka juga mampu menggunakan bahasa Indonesia yang terbatas. Ketika darurat militer di Aceh diterapkan pada tahun 2000, semua penduduk gampoeng Sikundo mengungsi ke rumah sanak famili di pusat kecamatan. Kondisi kecamatan Pante Ceureumen kala itu memang sangat rawan dengan intensitas kontak senjata sangat tinggi, hal ini disebabkan karena wilayahnya sangat dekat dengan gunung dan hutan. Mereka rata-rata menumpang di rumah kerabat atau mendirikan bangunan alakadarnya di tanah milik keluarga bahkan ada yang menyewa rumah. Setelah penanda tangan perjanjian damai mereka kembali lagi ke gampong, tetapi karena rumah-rumah telah lama ditinggalkan maka banyak rumah yang sudah lapuk dan rusak. Sebagai upaya yang mereka lakukan, mereka mendirikan rumah apa adanya.

Banyaknya dana otsus yang diplot ke Aceh paska konflik dan tsunami besar kemungkinan tidak menjangkau gampoeng Sikundo. Menurut pengakuan warga, belum pernah menerima bantuan setelah damai untuk memulai kembali kehidupan di lahan yang pernah mereka tinggalkan ketika darurat militer.

3. Aspirasi warga

Berdasarkan uraian kondisi masyarakat gampoeng Sikundo diatas, maka tidaklah menjadi sesuatu yang mengherankan jika mereka membutuhkan pembangunan sarana dan prasarana yang dapat menunjang pertumbuhan ekonomi sosial masyarakat seperti pemadatan jalan agar bisa dilalui baik ketika musim kemarau maupun musim hujan. Jembatan untuk memudahkan

dalam mengangkut hasil alam/pertanian ke pusat kecamatan, sarana pendidikan sebagai upaya pembangunan generasi kedepan. Paling tidak ada kelas jauh dimana guru mengunjungi siswa sehingga ramai anak-anak usia sekolah dasar mempunyai kesempatan untuk bersekolah. Disamping itu mereka juga sangat memerlukan kunjungan regular tim pelayanan kesehatan untuk mengobati penyakit-penyakit ringan. Mereka juga sangat membutuhkan rumah layak huni bagi kehidupan keluarga dan tempat tumbuh kembang anak-anak mereka. Untuk keperluan sosial kemasyarakatan mereka sangat membutuhkan rumah ibadah yang nyaman dan bangunan serba guna untuk berbagai keperluan kegiatan kemasyarakatan warga.

Dalam kaitannya dengan pemberdayaan ekonomi, warga sangat membutuhkan pelatihan dan bimbingan mengenai menerapkan metode pertanian yang sesuai di daerah mereka, bagaimana mengangkal hama dan membangun jaringan pemasaran. Mereka juga membutuhkan pengetahuan menanam berbagai jenis palawija yang dapat menjadi komoditi unggulan untuk dipasok ke pusat kecamatan bahkan kabupaten. Untuk menunjang keberhasilan program mereka juga membutuhkan bantuan bibit tanaman yang sesuai ditanam di daerah mereka menetap. Pada saat ini mereka sedang berupaya mengembangkan kopi robusta dan salak, namun mereka tidak memiliki pengetahuan yang memadai untuk menunjang upaya tersebut. Hal ini menjadi kebutuhan utama pra petani di gampong Sikundo. Disamping itu mereka juga sengan mengupayakan pembibitan dan pemeliharaan ikan air tawar, ini juga bermasalah dengan pengetahuan dan teknologi dimana mereka tidak memiliki pengetahuan yang cukup bagaimana metode pemeliharaan ikan air tawar.

4. Strategi Pemberdayaan.

Sebagaimana yang telah diuraikan pada bab sebelumnya tentang demografis, ekonomi dan sosial budaya gampong Sikundo, maka berdasarkan hasil temuan lapangan dapat disimpulkan kedalam beberapa bahagian pemberdayaan bagi masyarakat gampong Sikundo yakni; peluang, potensi, kebutuhan dan tantangan atau hambatan. Hasil dari Analisa ini diharapkan dapat memahami persoalan yang dihadapi warga Sikundo sehingga mampu merancang sebuah model dan kebijakan pemberdayaan terhadap masyarakat setempat sebagai berikut:

Potensi,

Setelah dianalisa secara seksama berdasarkan data temuan di lapangan maka potensi dan peluang untuk pemberdayaan di gampong Sikundo, dapat dilakukan sebagai berikut; Masyarakat gampong Sikundo telah mengalami kondisi yang sangat tidak menguntungkan semenjak Indonesia merdeka. Oleh karena itu mereka sangat ingin berubah untuk hidup lebih sejahtera. Semangat perubahan ini sangat penting dalam pemberdayaan untuk melakukan perbaikan-perbaikan dalam bidang apa yang sudah mereka geluti dengan menggunakan teknologi dan peralatan yang lebih baik, khususnya dalam bidang pertanian dan mereka siap bekerja bahu membahu untuk memberikan kontribusi terbaik yang mereka miliki.

Komunitas gampong Sikundo memiliki sumber daya alam yang sangat menjanjikan, lahan yang subur, cuaca yang sangat mendukung dan sumber air yang melimpah baik untuk kebutuhan penduduk maupun bercocok tanam, namun sangat dibutuhkan pembangunan sistem

pengairan dan penampungan sementara. Disamping itu sumber air dan lahan yang mereka miliki sangat layak untuk dijadikan pengembangan perikanan khususnya ikan air tawar. Rasio lahan cukup luas bila dibandingkan dengan jumlah penduduk. Lahan yang tersedia sangat subur dan sangat cocok untuk pertanian, palawija dan berbagai jenis hortikultura. Kondisi sosial masyarakat yang mampu beradaptasi dengan lingkungan dan hal-hal baru cukup tinggi. Organisasi dan struktur gampong sudah ada dan dapat difungsikan untuk menunjang program. Solidaritas sudah terbina dan keinginan untuk menolong antar sesama cukup tinggi. Potensi yang paling penting dimiliki gampong Sikundo adalah warga yang berumur produktif cukup tinggi sehingga sangat minim kendala kekurangan tenaga kerja.

Kebutuhan;

Berdasarkan hasil pengamatan langsung dan wawancara dengan warga komunitas gampong Sikundo, Kecamatan Pante Ceureumen, Kabupaten Aceh Barat maka dapat dirangkup beberapa kebutuhan pemberdayaan terhadap masyarakat sebagai berikut: dilihat dari kondisi perkampungan warga dan sejarah darurat militer dikawasan tersebut dimana mereka harus meninggalkan rumah dan gampong mereka selama lebih dari tiga tahun maka pembanguna rumah yang layak huni untuk tigapuluh kepala keluarga merupakan hal yang sangat mendesak agar mereka memiliki tempat tinggal yang layak. Melihat tingkat Pendidikan dan kemampuan untuk mengadopsi teknologi mereka sangat membutuhkan platihan dan pengembangan kemampuan bertani secara menyeluruh, termasuk metode penanggulangan hama tumbuh-tumbuhan. Untuk menunjang kegiatan pertanian untuk tahap awal mereka membutuhkan berbagai sarana penunjang seperti pupuk, obat-obatan dan benih tanaman serta workshop cara aplikasinya dilapangan. Pelatihan langsung dilapangan tentang tatacara menanam, merawat, pemupukan, penanggulangan hama dan pemanenan merupakan kebutuhan dasar dalam meningkatkan pengetahuan warga.

Pembinaan Micro;

Disamping pembangunan rumah layak huni, warga gampong Sikundo juga sangat membutuhkan pembangunan sarana peribadatan yang dapat digunakan untuk multi fungsi seperti tempat penyulusan, kegiatan psikososial, dan kegiatan-kegiatan masyarakat lainnya. Untuk menjaga konsistensi warga, penyediaan dana stimulus bagi warga untuk memulai bercocok tanam merupakan hal penting disamping bantuan peralatan kerja, bibit, pupuk dan obat-obatan untuk pertanian. Pendampingan merupakan suatu kegiatan yang sangat direkomendasikan untuk memastikan program tepat guna dan tepat sasaran.

Pembinaan Macro;

untuk menunjang kegiatan pemberdayaan baik kapasitas, sosial dan ekonomi, peningkatkan kualitas jalan agar dapat dilalui oleh roda empat dalam segala cuaca dan pembangunan jembatan penghubung antara gampong Sikundo dengan ibu kota kecamatan sangat diperlukan untuk membuka keterisoliran mereka. Program pemberdayaan juga perlu memfasilitasi

pembangunan hubungan kemitraan antara para petani dengan pedagang untuk memudahkan pemasaran hasil panen dan menjaga kestabilan harga sehingga para petani tidak dirugikan.

Kendala dan hambatan;

Dalam kegiatan pemberdayaan di gampoeng Sikundo, Kecamatan Pante Ceureumen, Kabupaten Aceh Barat teridentifikasi beberapa kemungkinan kendala yang perlu diantisipasi agar tidak mengganggu keberhasilan program, diantaranya adalah; Jalan sebagai sarana transportasi hanya lancar dilalui ketika musim kemarau, namun ketika musim hujan hubungan antara gampoeng Sikundo dengan pusat kecamatan sedikit terganggu. Pengetahuan warga tentang bertani dan penguasaan teknologi masih sangat minim. Fasilitas listrik belum tersedia di gampoeng Sikundo. Pola hidup masyarakat belum memahami higienis dan standar kesehatan.

D. Penutup

Kesimpulan;

Berdasarkan amatan dilokasi, fondasi tiang jembatan penghubung antara gampoeng Sikundo dengan ibu kota kecamatan sudah dibangun, maka untuk mempercepat proses pemberdayaan lanjutan pembangunan jembatan sangat penting segera dilakukan. Perbaikan kondisi jalan juga akan sangat membantu kesuksesan program. Disamping itu warga gampoeng Sikundo yang sudah lama hidup dalam kondisi tidak mapan dari segi pelayanan publik dan kesejahteraan sangat siap untuk melakukan perubahan agar dapat merasakan kehidupan yang sejahtera. Kondisi psikologis dan sosial warga yang saling bantu membantu merupakan modal yang sangat berharga dalam pemberdayaan. Pemerintah kabupaten Aceh Barat beserta jajarannya telah menyampaikan dukungan penuh mereka terhadap pelaksanaan program pemberdayaan dimaksud dan telah siap memberi dukungan yang dibutuhkan.

Rekomendasi;

Mengingat kondisi masyarakat yang sangat rentan baik dari segi ekonomi maupun pendidikan maka sebelum program pemberdayaan dilaksanakan penting untuk diberikan pemahaman kepada calon penerima program sedini mungkin agar mereka memahami betul bagaimana aturan dan kebijakannya dan dapat menghindari konflik sosial dari pelaksanaan program itu sendiri. Disamping itu perlu dibentuk tim terpadu baik dinas pertanian maupun perikanan dari pemerintah kabupaten agar sumber daya alam yang ada mampu dimanfaatkan oleh masyarakat khususnya penduduk gampoeng Sikundo untuk peningkatan sumber pendapatan keluarga. Untuk menciptakan rasa kepemilikan dari program, maka masyarakat atau perwakilan perlu dilibatkan dalam setiap kegiatan yang nantinya dapat menjadi salah satu upaya peningkatan kapasitas bagi mereka.

References;

Alkadaf, M. (2021). Pemberdayaan Sosial Dalam Penanggulangan Kemiskinan Studi Peran Kelembagaan Badan Usaha Milik Desa di Desa Rumbai Jaya, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau. *Jurnal Penelitian Kesejahteraan Sosial*, 20(1). Hal. 42.

- Berger, P. L., & Neuhaus, R. J. (1977). *To Empower People: The Role of Mediating Structures in Public Policy*. American Enterprise Institution for Public Policy Research.
- Catherine, D. (2007). *A Practical Guide to Research Methods, A User-friendly Manual for Mastering Research Techniques and Projects*. How To Books Ltd, 3 Newtec Place, Magdalen Road, Oxford OX4 1RE. United Kingdom.
- Dawson, E. L. (1998). "Assessing the impact: NGOs and empowerment" In *Women and Empowerment*, pp. 189-209.
- Denzin, N. K., & Lincoln, Y. S. (Eds.). (2011). *The Sage handbook of qualitative research*, sage publication, Thousand Oaks, California.
- Isbandi, A. R. (2008). *Perencanaan Partisipatoris Berbasis Aset Komunitas dan Pemikiran Menuju Penerapan*. Depok: FISIP UI Press.
- Kemosos (2019). Tugas dan Fungsi, accessed on 12 December 2019, from; <https://www.kemosos.go.id/>
- Kementerian Sosial RI. (2016). *Petunjuk Teknis Pemberdayaan Sosial Komunitas Adat Terpencil, Melalui Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan*. Jakarta; Direktorat PSKAT.
- Persoon, G. (1998). "Isolated Groups or Indigenous Peoples; Indonesia and the International Discourse". *Bijdragen tot de taal-, land-en volkenkunde/Journal of the Humanities and Social Sciences of Southeast Asia*, 154(2), 281-304.
- Rappaport, J. (1995). "Empowerment Meets Narrative: Listening to Stories and Creating Settings" In *American Journal of community psychology*, 23(5), 795-807.
- Republik Indonesia (2014) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 186 Tahun 2019 tentang Pemberdayaan Sosial Terhadap Komunitas Adat Terpencil, Jakarta; Republik Indonesia.
- Republik Indonesia (2019) Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2019 tentang Kesejahteraan Sosial. Jakarta; Republik Indonesia.
- Solikatur, S., & Masruroh, Y. (2018). "Kemiskinan dalam Pembangunan" dalam *Jurnal Analisa Sosiologi*, 3(1). Hal. 71
- Stake, R. E. (2010). *Qualitative Research: Studying How Things Work*. Guilford Press, New York.
- Tjokroamidjojo. (1989). *Teori Strategi Pembangunan Nasional*. Jakarta: Gunung Agung.